

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Konflik yang terjadi di Suriah yang pada awalnya terjadi pada tahun 2011 dimulai dengan aksi demonstrasi menuntut reformasi dan diturunkannya presiden Bashar al-Assad sebagai presiden. Hal ini dipicu oleh kejadian Arab Spring yang melibatkan negara-negara timur tengah lainnya. Tuntutan para demonstran dapat disimpulkan menjadi beberapa hal yaitu presiden Bashar al-Assad yang telah menjadi presiden selama beberapa periode, tidak meratanya pembangunan, serta indikasi privatisasi usaha milik negara.

Konflik Suriah yang pada awalnya merupakan konflik internal dalam negara berubah menjadi konflik internasional setelah adanya penembakan demonstran oleh tentara pemerintah. Para demonstran kemudian membentuk tentara pemberontak yang kemudian diberi nama *Free Syrian Army* (FSA). Setelah pembentukan tentara pemberontak tersebut konflik mengalami eskalasi yang signifikan sehingga konflik yang awalnya merupakan konflik internal berubah menjadi konflik internasional.

Konflik Suriah yang telah menjadi perhatian internasional dibahas dalam sidang umum Dewan Keamanan PBB. Draft resolusi kemudian dilayangkan oleh beberapa negara Barat yang sebelumnya telah melakukan hal yang sama terhadap konflik yang terjadi di Timur Tengah. Draft resolusi tersebut seperti sebelumnya

berisikan upaya kecaman, embargo, pemberian sanksi, hingga intervensi militer yang hanya menyudutkan otoritas yang sedang berkuasa untuk dijatuhkan dan diganti.

Disaat situasi dalam rapat Dewan Keamanan PBB seperti itu Rusia hadir sebagai *backup* terhadap Suriah, Rusia menolak dan menggunakan hak vetonya untuk menolak draft resolusi yang ditawarkan apabila hanya menyudutkan otoritas Suriah. Rusia mengambil tindakan tersebut dikarenakan cara-cara yang terdapat di dalam draft resolusi tersebut dinilai oleh Rusia tidak efektif lagi untuk menyelesaikan konflik. Rusia yang didukung oleh negara lain yang tergabung didalam BRICS memiliki draft resolusi sendiri berisi rancangan penyelesaian konflik Suriah secara damai. Hal tersebut dilakukan oleh Rusia sebagai peran Rusia untuk keluar dari kebiasaan penyelesaian konflik dengan cara dijatuhkannya otoritas yang sedang berkuasa serta intervensi militer seperti yang telah terjadi dalam kejadian *arab spring* sebelumnya.

Rusia yang telah lama bekerja sama dengan Suriah melakukan tindakan penolakan di Dewan Keamanan PBB tersebut tanpa diminta oleh Suriah terlebih dahulu. Hal tersebut didasarkan oleh tindakan independent Rusia, kedekatan dengan Suriah, serta kepentingan nasional yang ingin dilindungi oleh Rusia.

Pada tahun awal terjadinya konflik Rusia dalam menjalankan peran untuk menyelesaikan konflik secara damai telah melakukan upaya dengan melakukan perundingan dengan kedua belah pihak yang menjadi aktor utama dalam konflik. Rusia kemudian menjadi pihak ketiga setelah sebelumnya Suriah secara resmi

meminta bantuan kepada Rusia untuk mengupayakan penyelesaian konflik secara damai.

Dari analisis yang telah dilakukan ditemukan upaya penyelesaian konflik Suriah secara damai oleh Rusia termasuk ke dalam *third party intervention* dimana Rusia memenuhi empat dari enam kriteria seperti yang digagas oleh Ronald J. Fisher di dalam bukunya. Pertama Rusia sebagai pihak pendamai dimana Rusia mencegah upaya intervensi militer oleh negara lain dan memberikan draft penyelesaian konflik secara damai, serta Rusia secara aktif untuk melakukan perundingan damai dengan kedua kubu yang sedang berkonflik.

Kedua, Rusia sebagai penasehat hal ini ditunjukkan oleh Rusia dengan cara memberikan saran untuk menyerahkan segala macam senjata kimia untuk kemudian dihancurkan serta mengizinkan investigator PBB memasuki Suriah. Tindakan dari Rusia ini dapat memperbaiki nama Suriah di internasional dimana Suriah bersifat cooperative dalam penyelesaian konflik. Serta memberikan gambaran bagaimana pengaruh dari Rusia terhadap pengambilan tindakan oleh pemerintah Suriah.

Ketiga, Rusia sebagai mediator murni dimana pada tatanan ini Rusia menginisiasi upaya damai sebagai mediator. Mempertemukan kedua kubu yang berkonflik dan menghasilkan perjanjian gencatan senjata yang disetujui pihak yang terlibat. Keempat, Rusia sebagai penjaga perdamaian, banyak yang mempertanyakan tentang manuver militer yang dikirimkan oleh Rusia ke wilayah Suriah. Pengiriman militer tersebut menurut Ronald J. Fisher dapat dikategorikan sebagai penjaga perdamaian dimana militer tersebut dikirimkan untuk menjamin

berjalannya gencatan senjata, serangan yang dilakukan merupakan peran Rusia bersama tentara pemerintah Suriah untuk mengambil alih wilayah yang dikuasai oleh ISIS. Perlu digarisbawahi ISIS tidak termasuk ke dalam perjanjian gencatan senjata sehingga penyerangan tersebut bukanlah bentuk pelanggaran perjanjian gencatan senjata tersebut.

Peneliti pada akhirnya menyimpulkan bahwa Rusia menawarkan berbagai mekanisme penyelesaian konflik baik antara sipil, oposisi dan pihak pemerintahan, penghentian peperangan dengan mengajukan transisi perpolitikan Suriah, menawarkan resolusi pada pertemuan DK PBB, serta dalam lingkup antar negara yang diprakarsai Rusia bersama negara lain. Merujuk kepada konsep third party dari Ronald J. Fisher peneliti menyimpulkan upaya damai yang telah ditempuh oleh Rusia hingga akhir 2016 memenuhi empat kategori. Keempat kategori tersebut yaitu Rusia sebagai konsiliator, konsultan, mediator murni, dan penjaga perdamaian. Rusia menjalankan upaya yang efektif dalam manajemen konflik yang terjadi di Suriah sehingga perluasan serta penambahan aktor dalam konflik dapat dicegah. Akan tetapi, peran yang dilakukan Rusia belum mencapai kepada tahap penyelesaian konflik karena konflik masih terus berlangsung.

5.2 Saran

Konflik Suriah pada awalnya merupakan konflik internal akan tetapi berubah menjadi konflik internasional disaat aktor-aktor lain telah masuk ke wilayah Suriah. Rusia merupakan salah satu negara yang menjadi aktor di dalam arus konflik yang terjadi di Suriah. Rusia memberikan dukungan berupa hak veto,

menginisiasi perundingan damai, hingga bantuan kekuatan militernya sebagai peacekeeping.

Dengan tindakan Rusia di Suriah diharapkan cara diluar kebiasaan intervensi militer yang telah terjadi pada kejadian *arab spring* sebelumnya dapat menjadi jalan keluar pergolakan konflik di Timur Tengah yang telah berlangsung lama. Upaya yang ditempuh oleh Rusia untuk mempertahankan otoritas Suriah dapat menjadi gambaran baru untuk negara lain dimana menjatuhkan pemerintahan dan intervensi militer bukan lagi jalan keluar yang relevan dan efektif untuk menghentikan konflik.

Perlu untuk melihat sudut pandang lain dalam menyikapi sebuah konflik terlebih lagi konflik tersebut merupakan konflik internasional. Upaya penyelesaian konflik Suriah secara damai oleh Rusia dapat menggambarkan sudut pandang yang berbeda terhadap peranan Rusia dalam konflik Suriah. Rusia yang merupakan negara kuat seringkali dipandang dengan kekuatan, serta intervensi militernya dalam suatu konflik dengan adanya penelitian ini dapat dilihat sisi lain dari Rusia yang lebih diplomatik.

